**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

“We use Facebook to schedule the protests, Twitter to coordinate, and YouTube to tell the world.”[[1]](#footnote-1)

Arab Spring merupakan suatu kebangkitan dunia Arab yang lahir di Timur Tengah, sebuah daerah yang kaya minyak, sekaligus menjadi pemasok minyak terbesar dunia. Arab Spring jika diartikan secara literal, bermakna pemberontakan Arab atau Pemberontakan yang dimulai dari Tunisia pada musim semi, Desember 2010.[[2]](#footnote-2)

Pada saat itu Masyarakat menuntut mundurnya presiden Tunisia yang menjabat melalui kudeta yaitu Zine El Abidin Ben Ali yang sudah menjabat hampir 25 tahun, dibawah kekuasaannya yang diktator, berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan masalah-masalah lainnya terjadi di negara ini seperti kekerasan fisik, pembungkaman media pers, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kebebasan berpendapat dan kebebasan berpolitik. Yang membuat masyarakat Tunisia melakukan gelombang aksi turun ke jalan dalam skala besar dan juga demonstransi karena ketidakpuasan dan kemarahan mereka akan kepemimpinan Ben Ali, membuat Ben Ali diturunkan secara paksa oleh rakyat Tunisia.

Fenomena ini menjadi “inspirasi” bagi masyarakat di negara lain yaitu Mesir, yang dipimpin oleh presiden Husni Mubarak selama hampir 30 tahun lamanya untuk melakukan penurunan paksa terhadap kekuasaaan diktator Mubarak pada tanggal 25 Oktober 2011, revolusi ini terjadi selama 18 hari penuh dengan kekerasan dan konflik antara rakyat dengan pasukan pemerintahan Mubarak.

Sejak itu, Arab Spring telah terjadi di Tunisia dan Mesir, Pemberontakan Sipil di Bahrain dan Suriah, Perang Saudara di Libya, Protes-protes kecil di Kuwait, dsb. Ada pandangan lain yang mengatakan Arab Spring ialah gelombang Revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Sebuah Revolusi yang bertujuan untuk menggulingkan diktator yang berkuasa di negara-negara Timur Tengah. Peristiwa gelombang revolusi seperti ini terus menerus berlanjut ke berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika Utara seperti Yaman, Suriah, Bahrain, Iraq, Kuwait, Yordania, Lebanon, Maroko, Oman, Arab Saudi, dan Sudan.­­­

Dari berbagai revolusi di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika memiliki persamaan, yaitu adanya pengaruh kekuasaan diktator yang cenderung absolut dan identik dengan pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang membuat masyarakat di negara-negara tersebut tidak puas dan marah sehingga melakukan perlawanan dan usaha penurunan paksa setiap pemimpin diktator di negaranya dan menuntut kepemimpinan atau kekuasaan yang demokratis.[[3]](#footnote-3)

Di lain sisi, Arab Springs telah menjadi bagian penting dari fenomena HI kontemporer, dimana revolusi di beberapa negara dan memberikan kesejukan ditengah panasnya kondisi dan suasana politik di timur tengah, salah satu yang berperan penting dari suksesnya Arab Springs ini adalah adanya media sosial sebagai satu alternatif baru dalam menyuarakan perlawanan. Salah satu fakta kesuksesan media sosial dalam merubuhkan kekuatan tirani terjadi di salah satu Negara di Timur Tengah, Negara ini sangat terkenal karena selain sering menjadi rujukan sejarah karena peradaban masa lampaunya yang gemilan juga terdapat Universitas Al Azhar yang menjadi idaman bagi pembelajar Muslim seluruh dunia.

Berdasarkan beberapa definisi Arab Spring tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Arab Spring ialah suatu bentuk protes massa (revolusi) yang bertujuan untuk menggulingkan, menurunkan, melengserkan serta mengkudeta para pemimpin negara karena telah bertindak dictator, otoriter, korup, dan menindas rakyat dalam memimpin. Dalam Bahasa sederhananya rakyat (massa) turun ke jalan melakukan demonstrasi dan protes terhadap pemerintah, sekaligus menuntut presiden turun dari jabatannya. Itulah revolusi yang sedang terjadi di dunia arab.[[4]](#footnote-4)

Dalam Arab Spring atau revolusi negara-negara Timur Tengah tersebut, yang menjadi motor penggeraknya adalah para pemuda berpendidikan di masing-masing negara yang dilanda isu revolusi. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan otoriter sudah tidak tepat diterapkan di negara mereka. Mereka pun ingin mengubah system negara menjadi demokrasi. Dalam prosesnya, mereka menghimpun dukungan melalui berbagai media, terutama media sosial.

Munculnya revolusi di negara-negara timur tengah itu bukan tanpa dukungan pihak lain. Justru, banyak pendapat yang beranggapan bahwa revolusi Timur Tengah itu tak lepas dari campur tangan luar negeri (seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan sekutunya, serta negara-negara Timur Sosialis yang memiliki kepentingan terhadap Timur Tengah) dalam setiap aksi massa yang terjadi di negara yang sedang dilanda isu revolusi

Kejadian Arab Spring ini awalnya mengarah kepada perubahan peta politik di kawasan Timur Tengah, dengan gugurnya para pemimpin Arab yang mengusung gaya diktator dalam mengelola kekuasaan, mulai menampakkan kilas balik yang menguntungkan Israel, yaitu rontaoknya kekuatan militer negara-negara Arab yang dinilai menjadi ganjalan kuat terhadap perkembangan Israel dalam menundukkan Palestina. Akibatnya, agar bisa berkembang, banyak dari negara tersebut harus memulai dari nol dalam menata kehidupan sosial yang telah banyak mengalami kemelut internal sekaligus mengelola ekonomi negara yang telah jatuh terpuruk, serta memulai lagi membina kekuatan militer yang porak-poranda oleh keributan internal mereka. Namun yang menjadi pemicu paling menentukan justru situasi dan kondisi yang meliputi negara di Timur Tengah yang bersangkutan, terutama adanya kesenjangan sosial yang timpang Antara pemegang kekuasaan (pemerintah/rezim berkuasa) dengan masyarakat (rakyat)

Protes yang bernama Arab Spring ini menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan Skype. Tujuannya adalah untuk mengorganisir, berkomunikasi serta meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran internet oleh pemerintah. Dalam kejadian tersebut, banyak unjuk rasa ditanggapi keras oleh pihak berwajib, serta milis dan pengunjuk rasa propemerintah. Adapun slogan pengunjuk rasa di dunia Arab adalah ash-sha’b yurid isqat an-nizam (rakyat ingin menumbangkan rezim ini).[[5]](#footnote-5)

Jejaring Sosial (Sosial Network) saat ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan politik dan sosial di seluruh negara. Jejaring sosial mempengaruhi pemilihan-pemilihan umum politik dan berimbas pada perubahan sosial di berbagai Negara. Pada bulan Januari 2011, Facebook dan Twitter memiliki peranan penting atas kerusuhan, kegelisahan, pemberontakan dan revolusi di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Suriah, Aljazair dan Bahrain. Pengaruh yang kuat dari jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube dan lainnya dalam lingkup sosial dan politik suatu negara, terutama saat revolusi Mesir membuat pemerintah negara lain dan menjadi contoh untuk mempertimbangkan pengawasan dari jejaring sosial. Sebagi contoh, pemerintah China memblokir akses untuk pencarian bagi kata “Egypt” pada situs internet di China. Pemerintah China khawatir akan revolusi Mesir akan menginspirasi kerusuhan di China[[6]](#footnote-6)

Media Sosial sendiri memiliki definisi sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi [blog](https://id.wikipedia.org/wiki/Blog), [jejaring sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial), wiki, forum dan [dunia virtual](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunia_virtual&action=edit&redlink=1). Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.[[7]](#footnote-7)

Tanggal 25 Januari 2011 masyarakat Mesir mulai melakukan demonstrasi dan turun ke jalan menuntut lengsernya Presiden Hosni Mubarak. Ribuan orang berkumpul di lapangan Tahrir Square, Cairo. Mereka meneriakkan protes atas semua kejahatan Hosni Mubarak selama berkuasa, khususnya tentang korupsi besar-besaran yang ia lakukan.

Protes-protes besar-besaran yang dilakukan rakyat Mesir ditentang pemerintah. Tanggal 26 Januari 2011 terjadi bentrok antara masyarakat Mesir dan polisi. Bentrok terjadi karena para demonstran tidak mengindahkan larangan demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah. Korban-korban mulai berjatuhan dan banyak demonstran yang ditangkap. Berita tentang bentrokan tersebut dengan cepat menyebar di media-media sosial. *Facebook* dan *Twitter* diramaikan dengan hujatan, doa, dan semangat yang menggambarkan kemarahan dan semangat revolusi rakyat Mesir.

Aktivitas tukar menukar informasi melalui jejaring sosial, *Facebook* dan *Twitter*, dilakukan secara luas oleh masyarakat Mesir guna merencanakan penggulingan rezim otoriter Presiden Mesir Hosni Mubarak. Langkah ini ditempuh rakyat Mesir terkait krisis ekonomi yang berkepanjangan, korupsi yang merajalela dan kepemimpinan otoriter Presiden Hosni Mubarak. Setelah opini publik di Mesir terbangun, jutaan massa turun pun ke jalan dan berubah menjadi kekuatan rakyat (people power).

Selama ini, aktivitas rakyat Mesir selalu dikontrol ketat pemerintahnya. Bahkan ada yang menganalogikan, dinding-dinding rumah warga Mesir sebagai telinga pemerintahnya. Maka ketika saluran aspirasi disumbat dan dikontrol secara ketat, manusia yang pada dasarnya memiliki sifat zoon politican (makhluk politik), akan mencari alternatif lain untuk menyalurkannya. Salah satunya melalui media sosial yang cukup aman, yakni situs jejaring sosial.

Kepemimpinan otoritarianisme seperti di Mesir, sulit menjadikan jejaring sosial sebagai media sosial yang sehat bagi warga negaranya. Sebab menurut Julianne Schultz, kemampuan adaptif teknologi bagi tumbuhnya demokrasi hanya kompatibel dengan negara yang menganut prinsip demokrasi (*Universal Suffrage, Technology and Democracy*, 1994).[[8]](#footnote-8) Pada titik ini, maka penggunaan jejaring sosial secara demokratis di Mesir bagai praktik penyembuhan penyakit kronis yang memerlukan kesabaran. Ini terbukti, ketika rakyat Mesir turun ke jalan, Presiden Hosni Mubarak bahkan kian menjadi-jadi dengan menutup semua saluran komunikasi termasuk internet dan situs jejaring sosial di dalamnya.

Selama 30 tahun kepemimpinannya, Presiden Hosni Mubarak ternyata tidak memberi ruang dialektika bagi rakyatnya. Malah hak-hak sipil dan kompetensi komunikatif rakyat secara sistematis direduksi oleh kebudayaan otoritarianisme. Hal itu berimbas pada ketakutan yang berlebihan di ruang publik.

Aksi protes di Mesir yang dimulai pada tanggal 25 Januari 2011 dan terus berlangsung hingga tanggal 11 Februari 2011. Rakyat Mesir dari berbagai kalangan berbaur memenuhi jalan akibat ketidakpuasan mereka terhadap keadaan pemerintahan yang diselenggarkan pemerintah. Berbagai kalangan mulai dari kelompok demonstran oposisi, orang tua sampai anak-anak bergabung bersama menyerukan kekecewaan terhadap pemerintah. Tetapi pemerintah menanggapi demonstrasi tersebut dengan keras dan tidak menolerir pemberontakan yang direncanakan. Bahkan Hosni Mubarak yang saat itu masih menjabat presiden menghimbau bahwa masyarakat jangan meniru perjuangan yang dilakukan aktivis di Tunisia. Mubarak menghimbau bahwa keamanan negara adalah prioritas utama dan harus terus diperjuangkan meskipun menimbulkan kerugian.

Demonstrasi yang terus bergulir dan menjadi semakin besar mengakibatkan pihak pemerintah mengeluarkan reaksi keras dan mengerahkan tenaga keamanan untuk menertibkan para demonstran. Pihak polisi menindak keras para demonstran sehingga timbul banyak korban di kedua pihak. Polisi seringkali membubarkan kerumunan massa dengan bantuan kendaraan militer seperti panzer dan mobil anti huru-hara. Tindakan yang dilakukan polisi ini menyulut reaksi dunia yang menganggap bahwa perlakuan aparat keamanan terhadap demonstran berlebihan dan dapat dihindari. Tetapi bentrokan yang terjadi tidak hanya antara aparat keamanan dengan demonstran yang menginginkan Mubarak untuk mundur, tetapi juga dengan pihak yang pro dengan pemerintahan dan Mubarak. Dengan jumlah yang tidak sedikit demonstran pro Mubarak mengendarai onta dan kuda untuk membubarkan demonstrasi menentang pemerintahan. Bentrokan pun tidak dapat dihindari dan korban jiwa di kedua pihak pun semakin bermunculan.[[9]](#footnote-9)

Gerakan massa tersebut disebabkan karena masyarakat dinilai sudah jenuh dengan pemerintahan otoriter Hosni Mubarak yang telah ia jalankan selama 30 tahun. Kebijakan yang dilakukan selama 30 tahun tersebut seringkali dinilai tidak pro rakyat karena mementingkan kepentingan segelintir golongan atau kepentingan keluarganya.

Di setiap gerakan revolusi, selalu ada tokoh yang menjadi panutan. Mohamad Elbaradei, mantan kepala International Atomic Energy Agency (IAEA) yang juga pernah mendapatkan hadiah Nobel di bidang perdamaian pada tahun 2005, disebut-sebut sebagai orang yang akan menggantikan Hosni Mubarak sebagai presiden Mesir. Sehari setelah bentrokan di Tahrir Square, Elbaradei bergabung dengan para demonstran Mesir. Ia memang merupakan salah satu tokoh dari pihak oposisi yang memberikan kritik keras terhadap otoritas militer yang dipimpin Hosni Mubarak.

Aksi demonstrasi terus bergulir menyusul sikap pemerintah yang tidak juga mengabulkan tuntutan mereka. Pemerintah Mesir juga telah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk segera mengabulkan tuntutan rakyat Mesir, namun tak juga digubris. Presiden Mubarak tetap menolak mundur dan hanya bersedia merombak kabinet pemerintahannya. Dilansir dari Republika, tanggal 29 Januari 2011 Mubarak menunjuk Omar Sulaiman, Kepala Badan Intelijen sebagai wakil presiden. Rakyat Mesir tetap tidak puas, mereka akan tetap melanjutkan demonstrasinya hingga Presiden Hosni Mubarak turun dan dilakukan perombakan pemerintahan secara menyeluruh.[[10]](#footnote-10)

Presiden Hosni Mubarak beserta jajaran kabinetnya tidak henti-hentinya melakukan negosiasi dengan rakyat Mesir untuk mempertahankan pemerintahannya. Setelah menunjuk Omar Sulaiman, Mubarak juga melantik kabinet baru untuk mendinginkan massa. Anaknya, Gamal Mubarak, mengundurkan diri sebagai pemimpin partai berkuasa di Mesir Partai Nasional demokrat (PND). Mubarak menawarkan konsesi kepada rakyat Mesir untuk mengundurkan diri pada bulan September, ketika masa jabatannya berakhir. Tapi tuntutan rakyat ternyata tidak dapat ditawar lagi, rakyat Mesir mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.

Sebuah gerakan revolusi memang selalu memakan korban. Badan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) memperkirakan 300 orang telah tewas sepanjang demonstrasi yang terjadi di Mesir. Dilansir dari Detiknews.Com, Mesir menderita kerugian US$310 juta atau Rp. 3 trilyun perhari berdasarkan data dari Bank Credit Agricole. Imigran-imigran dari berbagai negara juga terpaksa dipulangkan dari Mesir karena aksi demonstrasi yang tak kunjung selesai. Revolusi Mesir tidak hanya meninggalkan luka psikis dan fisik bagi masyarakat, namun juga meninggalkan krisis ekonomi dan sosial yang besar.[[11]](#footnote-11)

Tidak hanya perang di dunia nyata, perang antara kelompok pro-pemerintah dan anti-pemerintah juga terjadi di dunia maya. Dilansir dari Kompas, dua akun *Facebook* yang menjadi pemicu gerakan revolusi Mesir, yaitu ”6th of April Youth Movement” dan ”We are all Khaled Said” dibanjiri komentar pendukung dan penentang pemerintahan Hosni Mubarak. Dalam kedua akun tersebut, kedua kelompok saling berperang komentar. Kelompok pro-pemerintah mengeluarkan kata-kata emosional untuk menyerang musuh mereka. Dalam akun ”We are all Khaled Said” misalnya, seseorang bernama Ahmed Shekoo menulis wall ”Kalian semua yang mendukung (gerakan) 6 April dan Khaled Said, saya yakin kalian didukung (kaum) Zionis, atau Hamas, atau Hezbollah,” seperti dilansir Kompas.com. Selain itu, kelompok pro-pemerintah juga mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menakut-nakuti kelompok anti-pemerintah agar mau menghentikan demonstrasinya.[[12]](#footnote-12)

Kelompok anti-pemerintah menilai serangan komentar dari kelompok pro-pemerintah tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memadamkan gerakan revolusi. Pendukung-pendukung Mubarak membuat akun-akun palsu dan ramai-ramai bergabung di akun-akun anti-pemerintah untuk mempengaruhi massa. Namun suara-suara anti revolusi tersebut diatasi dengan cepat oleh para oposan di internet. Dilansir dari Kompas, Ibrahim, seorang teknisi komputer dan aktivis dunia maya mengatakan ”Setiap ada orang yang memuat sesuatu yang melawan demonstran, kami cepat-cepat merapatkan barisan untuk membalas”.[[13]](#footnote-13)

Gerakan revolusi di dunia maya bukannya tanpa halangan. Tanggal 28 Januari 2011 pemerintah Mesir memblokir media sosial *Facebook* dan *Twitter*. Hal ini dipicu karena media sosial tersebut digunakan oleh kelompok anti-pemerintah untuk saling berkomunikasi dan menggalang kekuatan. Akibatnya Mesir menderita kerugian Rp. 812 Milyar.[[14]](#footnote-14)

Whael Ghonim, pembuat akun *Facebook* ‘We are all Khaled Said’ yang juga merupakan Manajer Marketing Google.Inc untuk kawasan timur tengah dan Afrika Utara, berhasil menyabotase jaringan internet yang telah diblokir pemerintah. Ia berhasil membuat jaringan komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses *Twitter* melalui sambungan telepon dan meninggalkan pesan suara. Berkat usahanya tersebut, masyarakat Mesir tetap dapat berkomunikasi, meskipun tidak selancar sebelumnya.

Integrasi kedua gerakan tersebut, gerakan nyata dan gerakan maya pada akhirnya berhasil menumbangkan pemerintahan Hosni Mubarak., Presiden Hosni Mubarak akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden Mesir pada tanggal 11 Februari 2011 dan menyerahkan wewenangnya kepada militer. Omar Sulaiman, wakil presiden yang pada waktu itu ditunjuk menyampaikan berita tersebut bahwa Dewan Militer akan memegang kendali atas Mesir. Rakyat Mesirpun bersorak gembira.

Siapa sangka, sebuah gerakan kecil yang dimulai dari media jejaring sosial dapat menumbangkan rezim diktator yang telah berkuasa selama 30 tahun. Rakyat Mesir tentunya sangat berterima kasih kepada media-media tersebut karena telah membantu mereka meraih reformasi yang selama ini mereka dambakan.

Pada kasus demokratisasi Tunisia dan Revolusi Mesir ini menarik untuk dibahas. Mengingat selama ini aksi revolusi selalu digerakkan oleh suatu kelompok tertentu yang menjadi oposisi rezim berkuasa atau adanya intervensi dari pihak luar. Terlepas dari sisi lain adanya intervensi atau apapun dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam revolusi Mesir ini tapi yang jelas adanya integrasi dari ribuan demonstran anti pemerintah yang seolah-olah sudah benar-benar telah menyimpan hasrat untuk menyudahi rezim Mubarak yang sudah berkuasa selama tiga dekade tersebut dan kemurkaan para demonstran terhadap pemerintah sehingga ketika ada penggerak yang sepaham dengan mereka dengan mudah dapat disatukan opininya untuk melakukan aksi demonstrasi.

Dengan demikian, untuk itu penulis berkeinginan untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan judul : **PERAN MEDIA SOSIAL DALAM DEMOKRATISASI TUNISIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP NEGARA MESIR (ANALISIS KASUS REVOLUSI 2010-2011)**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti, yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Media Jejaring Sosial dalam Demokratisasi Tunisia dan Mesir?
2. Apa Latar Belakang penyebab terjadinya Revolusi Mesir pada Januari 2011?
3. Bagaimana Dampak Demokratisasi Tunisia terhadap negara Mesir?
4. **Pembatasan Masalah**

Melihat begitu kompleks dan luasnya masalah yang akan diteliti maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan lebih menekankan pada Peran Media Sosial dalam Demokratisasi Tunisia dan Pengaruhnya Terhadap Negara Mesir. Adapun periode waktu yang akan diteliti adalah pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011.

1. **Perumusan Masalah**

Guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan diatas yang berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka diperlukan perumusan masalah yang menunjukkan :

**“Sejauh mana Peran Media Sosial dan dampak Demokratisasi Tunisia terhadap Negara Mesir (2010-2011)?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam upaya memperoleh informasi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang peneliti bahas (mengacu pada identifikasi masalah).

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa Pengaruh Media Jejaring Sosial dalam Demokratisasi Tunisia dan Mesir.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang penyebab terjadinya Revolusi Mesir pada Januari 2011
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak Demokratisasi Tunisia terhadap negara Mesir.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Dari Segi Akademis, penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pengkaji masalah-masalah internasional dalam mengkaji masalah masalah Timur Tengah, khususnya Revolusi Tunisia yang mempengaruhi demokratisasi di Mesir serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan komperatif bagi penelitian sejenis, dan aspek-aspek yang belum diketahui dan terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
6. Dari segi Pragmatis, penelitian sebagai bahan informasi dan masukan bagi pembuat kebijakan, terutama Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan terhadap negara-negara di Timur tengah dalam masalah demokrasi.
7. Sebagai laporan skripsi tugas akhir Studi Hubungan Internasional Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
8. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
9. **Kerangka Teoritis**

Sebelum penulis mengemukakan kerangka pemikiran, terlebih dahulu dikemukakan pendekatan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penulis mencoba untuk mengutip teori atau pendekatan para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dan disimpulkan pada kerangka pemikiran yang mana tindakan ini dimaksudkan untuk memberi pondasi teoritis yang pada akhirnya akan dapat membantu dalam memformulasikan hipotesis, dimana hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenomena dalam hubungan internasional. Sehingga penulis mengambil beberapa pendapat yang dapat disajikan sebagai panduan dan acuan dalam menyusun skripsi ini.

Kerangka pemikiran ini merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang terdapat antar berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahannya, juga merupakan kajian teoritis berdasarkan pengujian secara empiris terhadap kesimpulan analisis teoritis.[[15]](#footnote-15)

 Untuk memahani pengertian Hubungan Internasional, maka penulis mengambil pengertian dari **Suwardi Wiraatmaja** dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional* sebagai berikut :

**“Hubungan Internasional adalah kajian yang mempelajari berbagai fenomena yang melintas batas negara yang dilakukan oleh apa yang disebut *state* actor dan non-state actor yang meliputi individu, bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuasaan, tekanan-tekanan proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia.”**

 Terkait dengan ini juga **K.J. Holsti** dalam bukunya *International Politic*, mendefinisikan bahwa hubungan internasional sebagai berikut :

**“Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi diantara masyarakat dunia dan negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara lebih lanjut dikatakan termasuk dari dalamnya pengkajian terhadap Politik Luar Negeri dan Rolling serta meliputi segala segi hubungan diantara negeri di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai serta etika internasional.”**[[16]](#footnote-16)

Secara jelas, pengertian tersebut mengartikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah termasuk komponen-konponennya. Interaksi yang dilakukan tersebut tentu akan sangat berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya diantara actor-aktor negara dan actor-aktor non-negara.[[17]](#footnote-17)

Selanjutnya istilah **Peran** dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan mahyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut **Abu Ahmadi** (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut **Soerjono Soekanto** (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut dapat dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. (Soerjono Soekanto 1987: 220)[[18]](#footnote-18)

Berikutnya ialah demokrasi, secara etimologi demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* dan *kratein. Demos* berarti “rakyat”, sedangkan *kratein* dapat diartikan sebagai pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diterjemahkan sebagai “pemerintahan rakyat”.[[19]](#footnote-19)

Dalam hal ini demokrasi merujuk pada suatu usaha atau proses pemdemokrasian seluruh lapisan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. **Francis Fukuyama** dalam bukunya *The End of History and the Last Man* mengatakan bahwa : **“ . . . ia (demokrasi) menaklukkan ideologi-ideologi pesaingnya seperti monarki turun-temurun, fasisme dan baru-baru ini komunisme.”[[20]](#footnote-20)**

 Demikian pula dengan **Samuel P. Huntington** dalam *The Third Wave* yang menegaskan bahwa kejatuhan komunisme dunia sebagai momentum kelahiran kembali demokrasi secara utuh. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di Mesir ini, dimana kekuasaan kelompok militer lebih mendominasi dan tidak ada kesan demokrasi tersirat sedikitpun disana. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab Revolusi Mesir tahun 2011 lalu.

Sementara itu, **Robert A. Dahl** mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Yakni, sistem politik yang sepenuhnya responsive terhadap semua warga Negara.[[21]](#footnote-21) Agar suatu negara dapat diperintah secara demokratis, menurut Dahl diperlukan dua syarat utama, yakni : *pertama,* militer dan polisi harus berada di bawah pengawasan sipil ; *kedua,* sipil yang mengendalikan militer itu sendiri harus tunduk pada proses demokrasi. Sehingga dengan demikian, kekuatan persuasif lebih diutamakan daripada kekuatan koersif. Selain itu, diperlukan suatu tatanan yang disebut sebagai poliarki**,** yakni suatu tatanan politik yang pada tingkatnya paling umum dibedakan menjadi dua ciri : kewarganegaraan diperluas sampai mencakup bagian yang relatif tinggi dari dewasa, dan hak-hak kewarganegaraan mencakup kesempatan untuk menentang dan memberhentikan para pejabat tinggi dalam pemerintahan dengan melalui pemberian suara. Poliarki juga merupakan suatu tatanan politik yang dibedakan oleh tujuh lembaga : para pejabat yang dipilih ; pemilu yang bebas dan adil ; hak suara yang inklusif ; hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan ; kebebasan menyatakan pendapat ; informasi alternatif ; serta otonomi asosiasional.

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara demokrasi jika memenuhi syarat sebagai berikut :[[22]](#footnote-22)

1. **Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi**
2. **Kebebasan rakyat untuk berekspresi**
3. **Hak memilih**
4. **Seluruh rakyat memiliki hak yang setara untuk duduk di jabatan pemerintahan**
5. **Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing mendapat dukungan termasuk dalam bentuk suara rakyat dalam pemilu**
6. **Ketersediaan sumber informasi yang luas**
7. **Pemilu bebas dan adil**
8. **Institusi yang menetapkan kebijakan pemerintah mendasarkan keputusannya pada pemungutan suara dan cara pengungkapan aspirasi-aspirasi lainnya.**

Semua persyaratan di atas merupakan bentuk Negara demokrasi yang seharusnya menurut **Robert A. Dahl**. Ketika dilihat dari konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Dahl ini demokrasi di Tunisia dan Mesir ini belum memenuhi persyratan itu semua untuk dikatakan sebagai Negara yang demokratis dalam versi **Robert A. Dahl**. Maka tidak mengherankan jika apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir pada revolusi 18 Desember & 25 Januari lalu banyak terbantu oleh media massa karena sistem otoritarianisme yang diterapkan oleh rezim Mubarak tidak memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk berpendapat. Dan media merupakan satu-satunya media yang dapat mereka jadikan sebagai tempat menumpahkan segala tindak-tanduk pemerintah yang tidak pro rakyat.

Berikutnya, revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dalam sebuah revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau dengan kekerasan. Revolusi Mesir dan Tunisia merupakan akumulasi kekecewaan punlik yang selama puluhan tahun dikekang oleh Rezim Mubarak dan Ben Ali.

Dalam hal ini, **Guilllermo O’Donnel** dan **Phillipe C. Schmitter** menyatakan bahwa “transisi” adalah interval (selang waktu) Antara satu rezim politik dan rezim yang lain. Transisi dibatasi oleh dimulainya proses perpecahan rezim *authoritarian* oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan beberapa alternative revolusioner.

Selama masa transisi, bila memang ada aturan-aturan yang efektif cenderung berada dalam genggaman pemerintah otoriter.[[23]](#footnote-23) Di mesir dan Tunisia, transisi dari otoriterisme ke demokrasi melibatkan proses yang sangat panjang dan kompleks. Banyak pendukung rezim lama masih tetap bertahan, pada saat yang sama kekuatan reformasi tidak terkonsolidasi dengan baik dan bahkan sebaliknya, kecurigaan timbal balikpun kian meningkat ditambah lagi dengan tidak adanya figur-figur sentral yang dapat membuat berbagai kalangan tersebut dapat menumbuhkan rasa saling percaya sedikit demi sedikit.[[24]](#footnote-24) Kini waktunya bagi rakyat Mesir dan Tunisia untuk mendapat haknya yang sah untuk menentukan masa depannya.

Menurut **Dumairy** (1966) sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dumairy berpendapat bahwa sebagai bagian dari sistem kehidupan, sistem ekonomi disuatu negara berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung dalam masyarakat dan system ideology politik di negara tersebut. Di mesir dan Tunisia sistem ekonomi di negara tersebut tidak mencerminkan keadilan. Terjadi kesenjangan yang sangat terlihat antara kelompok elit dengan mayoritas masyarakat miskin, dikarenakan korupsi terjadi dimana-mana dan banyaknya pengangguran.

Berikutnya, konflik terjadi dimana biasanya kelompok atau individu berusaha untuk mencapai suatu tujuannya tersebut dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

**“Konflik adalah tindakan yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang terorganisir muncul akibat dari posisi yang sering bertentangan, sikap bermusuhan dan tindakan militer atau diplomatik dari beberapa kelompok tertentu atau suatu permasalahan kelompok yang terlibat dalam konflik biasanya tidak selalu bertentangan dengan pemerintah bangsa dan negara.”[[25]](#footnote-25)**

Dari berbagai konflik atau perselisihan yang terjadi, memiliki teori mengenai penyebab perang atau sebab-sebab konflik.

1. **Teori Hubungan Masyarakat**
2. **Teori Negosiasi**
3. **Teori Kebutuhan Manusia**
4. **Teori Identitas**
5. **Teori Kesalahpahaman antar Budaya**
6. **Teori Transformasi Konflik[[26]](#footnote-26)**

Dalam hal ini pelanggaran HAM terjadi dimana-mana, adapun mengenai Hak Asasi Manusia, **Thomas Hobbes** melihat bahwa HAM merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan. Sebaliknya, **John Locke** berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Menurutnya, yang harus diserahkan yaitu hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan. Yaitu *life, liberty*, serta *estate*. Maka sangatlah logis jika tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada masing-masing individu yang berada di negara tersebut. Dasar pemikiran John Locke inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan HAM.[[27]](#footnote-27) Pelanggaran HAM di Mesir menurut Dewan Nasional HAM Mesir dalam laporan tahunannya mengungkap tentang perlakuan buruk terhadap mereka yang dicekal di kantor polisi, penyiksaan terhadap para tahanan, penangkapan aktivis politik dan penulis Web blog, serta peradilan warga sipil di mahkamah militer merupakan sederet contoh kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Mesir. Laporan itu juga mengatakan bahwa penyiksaan terorganisir di penjara-penjara Mesir telah berubah menjadi hal yang wajar.kini telah tercatat telah sekitar 40 lembaga internasional pembela HAM mendesak Kairo untuk menghormati prinsip-prinsip HAM dan menghentikan aksi penyiksaan terhadap tahanan.[[28]](#footnote-28)

 Definisi HAM menurut **Syafrudin** yaitu sebagai berikut :

 **“Hal ini menarik perhatian internasional sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), semakin maraknya pelanggaran HAM mengakibatkan nilai universal HAM mengkristal menjadi isu global. HAM tidak lagi dilihat sebagai perwujudan paham individualism dan liberalisasi, namun lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, warna kulit, jenis kelamin, ataupun pekerjaan kita.”[[29]](#footnote-29)**

Sedangkan menurut **David P. Forsythe** kategori HAM sebagai berikut :

**“HAM secara tradisional dibagi menjadi 3 kategori, yaitu HAM generasi pertama dengan kebebasan sipil dan politik. Generasi kedua meliputi hal ekonomi, sosial dan budaya. Generasi ketiga adalah hak solidaritas untuk perdamaian, pembangunan, lingkungan yang sehat, warisan yang sama, dan bantuan kemanusiaan.”[[30]](#footnote-30)**

 Dalam hal ini banyak kejahatan yang telah dilakukan oleh Rezim Ben Ali dan Mubarak dengan pemerintahannya yang merugikan rakyat Tunisia dan Mesir.

Pada teori **Realitas Ortodok,** dalam hubungan internasional, negara-negara dianalogikan dengan bola-bola bilyar yang interaksi-interaksinya dapat bengan baik dipahami sebagai konsekuensi dari hierarki kekuasan yang lama. Teori ini diawali oleh karya **E. H Carr**, *The Twenty Years Crisis*pada tahun 1939. Carr mencoba untuk mengkritik beberapa kesalahan dalam teori liberal internasionalisme yang muncul sebelumnya sebagai sebuah tanggapan atas Perang Dunia Pertama. Liberalisme mengatakan bahwa masyarakat tidak ingin berperang dan kemudian hanya pemerintah otoriterlah yang membuat peperangan antar negara terjadi.

Selanjutnya merupakan **Teori Media Baru**, yaitu Teori Jaringan Aktor yang menjelaskan tentang adanya hubungan antar unsur manusia (entitas sosial) dan non manusia (entitas teknis) di dalam suatu jaringan, dimana keduanya dapat disebut sebagai aktan.

Media baru atau yang dikenal dengan istilah *new media*saat ini kerap dimanfaatkan berbagai kalangan. Sebagai contoh, penggunaan situs jejaring sosial (*social network sites*) tidak hanya digunakan untuk menjalin pertemanan dan media hiburan, namun juga sebagai alat untuk mengatur massa dan mempengaruhi aktor-aktor lain. Dalam teori jaringan aktor, hal ini menunjukkan bahwa aktor dalam jaringan tersebut saling berhubungan.[[31]](#footnote-31)

Salah seorang pengamat waktu itu, **Marshall McLuhan** dalam bukunya, Understanding Media The Extensions of Man menyatakan bahwa,

**“Medium yang dipakai untuk menyampaikan informasi dan pesan, membentuk format pesan itu sendiri. Dan media sebagai perluasan manusia, serta media yang berbeda-beda mewakili pesan yang berbeda-beda. Media menciptakan dan mempengaruhi cakupan serta bentuk dari hubungan-hubungan dan kegiatan-kegiatan manusia. Pengaruh media dengan adanya kemajuan teknologi menjadi sangat dahsyat bagi umat manusia. Media telah campur tangan dalam kehidupan manusia secara lebih cepat daripada sebelumnya, juga memperpendek jarak diantara bangsa-bangsa.”**

Analogi dari pernyataan McLuhan kalau melihat kondisi sekarang, bisa dikatakan bahwa teknologi bisa merupakan sebuah pesan. Teknologi itulah yang menghasilkan medium baru dan melahirkan teori media baru. Dengan adanya kemajuan teknologi, media menjadi sangat maju. Media telah berubah menjadi subjek komunikasi yang interaktif dan menjadi sahabat baru manusia. Pola interaksi sosial melalui media jaringan (komputer) telah menciptakan ruang baru bagi kehidupan manusia yang disebut cyber-community (komunitas cyber) yang juga turut andil dalam membentuk suatu pola hubungan sosial yang tanpa batas, sangat luas dan transparan[[32]](#footnote-32)

Berita (menurut KBBI) adalah laporan atau pemberitahuan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa yang disampaikan melalui orang lain, baik secara lisan maupun tertulis.[[33]](#footnote-33) Pengertian berita (News) yang dimaksud adalah penyajian informasi yang sudah, sedang dan akan terjadi. Berdasarkan sejarah perkembangan berita, maka dapat dikategorikan bentuk penyajian berita, yaitu :

1. Berita cetak (Print News), yaitu berita yang dibuat dengan teknologi percetakan yang dalam hal ini Koran dan majalah.

2. Berita broadcast (Broadcast News), yaitu berita yang menggunakan media televisi dan radio.

3. Berita elektronik (E-News), berita yang menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan komputer global. Terdapat juga beberapa istilah untuk berita elektronik yaitu online news atau digital news.[[34]](#footnote-34)

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan adanya tuntutan perubahan bentuk berita, dari pers cetak dan broadcast menjadi bentuk berita elektronik (E-News). Berita elektronik khususnya lewat internet sekarang berkembang pesat, dimana hampir tiap surat kabar dan majalah di Indonesia sudah mengembangkan edisi online. Belum lagi kalau dilihat secara internasional khususnya Amerika Serikat, yang sudah mengembangkan lebih dulu surat kabar dan majalah online mereka.

Internet, sebagai sebuah jaringan komputer global, merupakan suatu teknologi yang memicu perkembangan berita elektronik. Teknologi internet memungkinkan berita dipublikasikan dengan menggunakan format Hypertext Mark Up Language atau biasa disingkat menjadi HTML. Dimana, format berita baik itu dalam bentuk teks, gambar atau foto, video, audio, animasi disajikan secara digital, sehingga pembaca dapat mengakses dari komputer dengan cepat dan seketika pada halaman web. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Oleh karena itu, internet sebagai medium informasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan media massa lain. Mudah mengaksesnya, memproduksi dan menyebarkan dengan cepat dan murah dengan daya jangkau dunia.

Media bukanlah kekuatan netral dan tidak akan pernah menjadi kekuatan netral. Meskipun para akademisi dan wartawan dengan gigih menyerukan pentingnya jurnalisme yang mengabdi pada kebenaran, obyektivitas, dan orientasi pada kepentingan warga negara, tetapi pada kenyataannya jurnalisme dan media selalu berpihak pada kelompok elit. **Edward S. Herman dan Noam Chomsky** dengan tegas mengemukakan bahwa di luar fungsi-fungsi lainnya media melayani dan mempropagandakan kepentingan-kepentingan kelompok sosial yang mengontrol dan membiayainya.

Dalam artikel yang berjudul “Paternalisme Baru : Membentuk Opini Publik”, **John Dewey** mengemukakan bahwa demokrasi dikontrol melalui opini mereka, opini yang dibentuk atas dasar materi yang mereka peroleh, dan bahwa propaganda disamarkan sebagai distribusi berita melalui cara yang termurah dan terefektif untuk mengembangkan perasaan publik yang paling diinginkan. Selanjutnya, Dewey mengkritik lebih jauh dengan mengatakan bahwa para penguasa selalu menggunakan pengaruh terhadap opini, dan ketika penemuan media massa telah mulai menyebar dan menarik perhatian membuat propaganda menjadi suatu pengaruh komunikasi lebih besar pada era modern.

Selanjutnya teori **Media Sosial,** Media sosial salah satu bagian dari media massa yang merupakan sebuah media *online* di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi [blog](http://id.wikipedia.org/wiki/Blog), sosial network atau [jejaring sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial), wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.[[35]](#footnote-35)

Sementara jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.[[36]](#footnote-36) Menurut **Antony Mayfield dari iCrossing**,

**“Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas.”**

Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat.[[37]](#footnote-37)

Dari sini dapat dilihat bahwa media sebagai sarana komunikasi yang kini semakin canggih dapat membantu segala bentuk aktifitas apapun, termasuk menyatukan suatu opini massa atau untuk membentuk suatu komuitas. Jika dikaitkan dalam revolusi di Tunisia dan Mesir hal ini sangat wajar jika rakyat Mesir menggunakan media sosial sebagai alat mereka untuk melawan pemerintah atas kebijakan-kebijakannya selama ini yang tetap mebuat angka kemiskinan di Mesir semakin meningkat.

Berdasarkan pemaparan dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik asumsi sebagai berikut :

1. Kegagalan dari pemerintahan Ben Ali membuat rakyat Tunisia memberontak karena telah banyak dirugikan baik dalam hal politik, sosial, ekonomi, hingga telah terjadinya banyak kejahatan-kejahatan lain.
2. Proses demokratisasi di Mesir banyak dipicu dari ketidakmampuan pemerintah Mesir di bawah Rezim Husni Mubarak sendiri dalam mensejahterakan rakyatnya. Seperti kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, korupsi, banyaknya pelanggaran HAM serta jenuhnya rakyat atas sistem otoriternya Mesir yang membuat kurangnya kebebasan dalam berpendapat.
3. Tidak bisa dipungkiri peran media sangat sentral dalam proses demokratisasi di Tunisia dan Mesir, baik melalui media sosial seperti twitter, facebook, weblog, dsb. Hal ini dikarenakan media sosial merupakan alat serta kekuatan rakyat untuk mewujudkan sasarannya.

Berdasarkan konsep yang telah penulis paparkan tersebut, maka penulis dapat menggunakan teori-teori tersebut untuk menentukan bagaimana demokratisasi di Tunisia bisa menyebar dan mempengaruhi demokratisasi di Mesir.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**“Media Sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap demokratisasi di Tunisia dan hal itu juga mempengaruhi demokratisasi di Mesir pada Rezim Husni Mubarak”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Teoritik, Empirik dan Analisis)**

**Tabel Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Variabel Bebas :Media Sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap demokratisasi Tunisia | 1. Penyebaran informasi menggunakan Twitter
2. Penyebaran video kekejaman Rezim melalui Facebook
3. Salah satu Penyebab Demokratisasi di Tunisia
 | 1. Dalam kasus Tunisia. Semula lalulintas Twitter masih membahas Mohamed Bouazizi, lalu berkembang menjadi Sidi Bouzid (tempat unjuk rasa pertama) dan memuncak menjadi Tunisia. Para simpatisan global pun tergerak untuk membantu. (<http://www.sudutpandang.com/2011/04/internet-twitter-demokrasi-dan-revolusi/>)
2. Facebook, lebih dari itu. Dalam kasus Tunisia, dimanfaatkan untuk berbagi video tentang kekejaman rezim. Segala fitur di Facebook yang amat kaya itu, termasuk wall, email, chat, group, fanpage dan agenda, dimanfaatkan para aktivis pro demokrasi. Di situlah mereka bisa berbagi informasi, membangun agenda, mengorganisasikan gerakan turun ke jalan. (<http://www.sudutpandang.com/2011/04/internet-twitter-demokrasi-dan-revolusi/>)
3. Mohamed Nejib Hachana,“Revolusi di Tunisia bukan disebabkan alasan ekonomi dan sosial, tapi menurut saya, pertama karena alasan kebebasan dan demokrasi di dalam kehidupan berpolitik di Tunisia.” Dikutip dari Mantan Duta Besar Tunisia untuk AS (http://dunia.tempo.co/read/news/2011/06/05/119338680/revolusi-tunisia-untuk-kebebasan-dan-demokrasi)
 |
| Variabel Terikat :Hal itu juga mempengaruhi Demokratisasi Mesir pada Rezim Husni Mubarak | 1. Krisis Demokrasi di Mesir
2. Terjadi tindak kekerasan terhadap demonstran
3. Kesuksesan Rakyat menumbangkan Rezim
 | 1. Mesir yang diklaim sebagai negara demokrasi pertama di Timur Tengah kini justru kembali kepada situasi ketidakpastian demokrasi

(<http://gagasanhukum.wordpress.com/2013/07/11/mesir-dan-transisi-demokrasi/>)1. Dalam dokumen yang bertajuk Broken Promises : Egypt’s Military Rulers Erode Human Rights, organisasi HAM internasional menyoroti kenerja Dewan Jenderal Mesir (<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=46588>)
2. Kesuksesan Tunisia mengilhami Raykat Mesir untuk melakukan hal yang sama mengingat mereka memiliki persoalan yang sama (Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah Kejatuhan Para Penguasa Otoriter* (Jogjakarta : NARASI, 2011), hlm. 11.)
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Media Sosial

Facebook

Twitter

Youtube

dll

Pergerakan Massa di Mesir

Revolusi Tunisia

Revolusi Mesir

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

*Level of Analysis* yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan pada masalah yang akan dikaji. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan maka harus menganalisa. Dalam studi hubungan internasional perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi demi memperjelas proses pembentukan teori.

Adapun tingkat analisis yang digunakan adalah Tingkat Analisis Korelasionis, karena Unit Analisa dan Unit Eksplanasinya sejajar, yaitu Negara-Bangsa (State).

1. **Metode Penelitian**

Dilihat dari kebijakan-kebijakan dan isu-isu lainnya dan disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu mengumpulkan, menyusun, menjabarkan, merekonstruksi serta menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dilakukan penganalisaan data-data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relatif lengkap serta dapat dipercaya dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Library Research*, yaitu data-data yang bersumber ataupun diambil dari media online, buku, jurnal dan website.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Penulis merencanakan akan melaksanakan penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan di beberapa tempat sebagai berikut :

* Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Jln. Soekarno-Hatta No. 629 Bandung
* Perpustakaan FISIP UNPAS Jln. Lengkong Besar No. 68, Bandung.
* Perpustakaan UNPAR Gedung 9 Lantai 2 & 3
Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.
1. **Lamanya Penelitian**

Peneliti memperkirakan penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2015 sampai dengan Bulan April 2016

**Tabel Kegiatan Penelitian 2015-2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  Bulan & MingguKegiatan | November | Desember | Januari | Februari | Maret | April |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Tahap Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Konsultasi Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kegiatan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Peny. Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Seminar Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**
* Pada **BAB I** berisikan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Operasionalisasi Variabel dan Indikator, Skema Kerangka Teoritis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Tingkat Analisis, Sumber Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jadwal dan Kegiatan Penelitian serta Sistematika Penulisan
* Pada **BAB II** ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas, menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut, yaitu definisi dari sosial media. Kemudian Bab ini akan memberikan konteks historis atas munculnya Jejaring Sosial Media di Tunisia. Dan sebagai disertasi yang bertujuan untuk menganalisis konektivitas antara media sosial dan mobilisasi politik melalui penciptaan jaringan di masyarakat.
* Pada **BAB III** ini berisi uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lain, secara khusus akan membahas kasus revolusi Mesir 2011 yang menyebabkan perubahan rezim. Pertama, peristiwa revolusi yang sebenarnya akan diringkas, dalam rangka untuk menganalisis apakah media sosial memainkan peran murni positif dalam pemberontakan, dan apakah itu terus membentuk mengubah rezim berikutnya sampai sekarang hari.
* Dalam **BAB IV** ini berisikan pembahasan, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data dalam rangka untuk menganalisis apakah media sosial memainkan peran murni positif dalam pemberontakan, dan apakah itu akan terus membentuk atau mengubah rezim berikutnya. Kemudian akan menempatkan penggunaan media sosial di Tunisia & Mesir dalam konteks yang lebih luas sebagai media yang demokratis. Serta diakhiri dengan mengevaluasi dampak demokratisasi Tunisia terhadap Negara Mesir.

Akhirnya, dalam **BAB V** akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang telah didapatkan

1. Anonymous Cairo activist, quoted in Nadine Kassem Chebib & Rabia Minatullah Sohail, “The Reasons Social Media Contributed to the 2011 Egyptian Revolution,” [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Agastya ABM, *Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah* (Jogjakarta : IRCiSoD, 2013), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.academia.edu/3812208/Paper_Fenomena_Arab_Spring> diakses pada 21 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid. Hal 12 [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Agastya ABM, Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah (Jogjakarta : IRCiSoD, 2013), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ashraf M. Attia, “The impact of social networking tools on political change in Egypt’s Revolution 2.0”, Journal of Electronic Commerce Research and Applications, Tahun 2011, diakses pada 21 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial>, diakses tanggal 05 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mesir, Jejaring Sosial, dan Demokrasi Digital, <http://www.investor.co.id/home/mesir-jejaring-sosial-dan-demokrasi-digital/4961>. diakses 22 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.duniaesai.com/index.php/direktori/esai/50-lain-lain/461-revolusi-mesir-pergantian-sistem.html> diakses 22 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1274:ketika-media-sosial-menjelma-jadi-alat-revolusi&catid=44:wawas&Itemid=158> diakses tanggal 22 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/revolusi-mesir-dalam-perspelktif-geakan-islam-masa-depan.htm> diakses 22 desember 2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://www.suaramedia.com/dunia-teknologi/computer-it/43326-sang-pahlawan-revolusi-mesir-siap-angkat-kaki-dari-google.html> diakses 22 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-12)
13. http://kompasiana.com/nasional/158/video/demokrasi-mesir-melalui-media-sosial. diakses 22 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-13)
14. Kompas, Sabtu 29 Januari 2011, *Mubarak Terancam Akses Layanan Internet Dan Telepo Seluler Di Mesir Ditutup*, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jujun S. Suriasumantri, *Fisafat ilmu : Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta : Pustaka Sinar Rajawali, 1990), hlm. 128. [↑](#footnote-ref-15)
16. K.J. Holsti, Politik Internasional : Suatu kerangka analitis, terjemahan Wawan Juanda (Bandung : Binacipta, 1997), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-16)
17. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002) [↑](#footnote-ref-17)
18. digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf diakses 23 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-18)
19. Miriam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 2005), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-19)
20. Francis Fukuyama, “The End of History and The Last Man” (Yogyakarta: Qalam, 2003) hlm. 1-3 [↑](#footnote-ref-20)
21. Robert A. Dahl, *Participation And Opposition*, New Heaven, Yale University Press, 1971, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-21)
22. Robert A. Dahl, *Poliyarchy: Participation and Opposition, New Haven : Yale University Press*, 1971, hlm. 3. dalam Suyatno, Menjelajahi Demokrasi, 2008 Humaniora. hlm. 42. [↑](#footnote-ref-22)
23. <http://globalisasi.wordpress.com/2006/7/10/pendekatan-konseptual-terhadap-transisi-demokrasi/> diakses 26 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-23)
24. Menurut Dr. Essam El-Haddad, salah satu pemimpin muda Ikhwanul Muslimin (IM) masa pasca Mubarak dangat krusial bagi masa depan Mesir baik politik maupun ekonomi. [↑](#footnote-ref-24)
25. K.J. Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Juanda, 1987, Bandung : Binacipta), hlm. 592. [↑](#footnote-ref-25)
26. SN. Kartikasari, *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak* (Terjemahan SN. Kartika, Meiske D. Tapilatu, Rita Maharani, Dwiati Novita Rini), (Jakarta : The British Council, Indonesia, 2001), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sidik, Fatah H, Pemikiran Politik Zaman Pencerahan dan Reformasi (Antara Hobbes dan Locke), dalam <http://seedhieqz.wordpress.com> diakses 26 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-27)
28. <http://khabarmuslim.com/pelanggaran-ham-di-mesir.html>, diakses 26 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-28)
29. Syafrudin Bahar, Hak Asasi Manusia : Analisi Komnas HAM dan Jajaran HANKAM/ABRI (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-29)
30. David P. Forsythe, *Human Right and World Politic* (Nebraska : University of Nebraska Press, 1989), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-30)
31. <http://www.komunikasi.us/index.php/course/5395-kajian-teori-jaringan-aktor-dalam-media-baru> diakses 23 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-31)
32. Burhan Bungin, 14 Oktober 2002. New Media dan Perkembangannya; Konstruksi Sosial Telematika dan Inovasi Media Baru, Seminar dan Lokakarya “Being Local in National Context : Understanding Local Media and Its Struggle”, Universitas Kristen Petra. Surabaya [↑](#footnote-ref-32)
33. Peter, Salim dan Yenny, Salim, 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English Press. Jakarta. [↑](#footnote-ref-33)
34. Muljono. 2001. Sistem Berita Elektronika di Intranet Universitas Pelita Harapan Menggunakan Lotus Notes dan Domino. Jurnal Ilmiah Universitas Pelita Harapan, LPPM-UPH Menara UPH – Lippo Karawaci – Tangerang.Vol. 4/No.7 hlm. 37. [↑](#footnote-ref-34)
35. Effendy, Onong Uchjana. 2003*. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Citra Aditya Bakti. hlm. 82 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid. hlm. 82 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid [↑](#footnote-ref-37)